

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Batang

45 Anggota DPRD Batang Dilaporkan ke Kejaksaan Batang

<http://www.suamerdeka.com/news/detail/21913/45-Anggota-DPRD-Batang-Dilaporkan-ke-Kejaksaan-Batang>

▪ Terkait Dana Aspirasi

BATANG, suamerdeka.com- Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Batang dilaporkan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) ke Kejaksaan Negeri Batang. Laporan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari dana aspirasi APBD tahun 2016 dan 2017 dan disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Disperdades).

Laporan dilakukan Ketua PD GNPK Kabupaten Batang Izza Nur Kalam serta Sekretaris GNPK Batang Muhammad Zaenudin. Keduanya diterima oleh Kasie Intel Kejaksaan Negeri Batang Arfan Halim.

"Laporan telah kami lakukan pada Senin (2/4) kemarin ke Kejaksaan Negeri Batang," ujar Izza Nur Kalam, Selasa (3/4).

Dia menjelaskan, laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang dinilai telah cukup. Dari hasil investigasi satuan tugas tipikor GNPK RI Batang dengan sampling pada beberapa desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Batang, untuk pengusulan, pengalokasian, penerimaan serta pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari dana aspirasi DPRD tahun 2016 dan 2017 telah ditemukan beberapa indikasi penyimpangan.

"Dari hasil wawancara langsung dengan kepala desa penerima bantuan, mereka mengakui dalam pencairan dana aspirasi DPRD Batang diduga dikenakan beban fee rata-rata sebesar 10% jumlah dana aspirasi. Dan itu dinilai memberatkan," katanya.

Daftar penerima dana aspirasi DPRD Batang tahun 2016 terdiri dari 371 paket program bantuan sebesar Rp 28.563.440.000. Sementara penerima dana aspirasi DPRD Batang tahun 2017, terdiri dari 314 paket program bantuan sebesar Rp 29.313.998.900. Izza menambahkan, beban fee atas pencairan dana aspirasi sebagian ada yang diminta pada saat pencairan dana aspirasi DPRD ke desa yang bersangkutan.

"Dari hasil temuan kami, ada program kegiatan di desa-desa yang dilaksanakan pekerjaannya oleh keluarga oknum anggota DPRD. Disamping itu terdapat temuan penyimpangan pelaksanaan program pembangunan di desa yang tidak sesuai peruntukan. Ada juga temuan kualitas hasil pembangunan desa yang tidak sesuai dengan standarisasi kualitas konstruksi bangunan, gedung, jalan dan jembatan," ujarnya.

Izza mengungkapkan, dugaan kerugian negara dari dana aspirasi DPRD ini dinilai mencapai miliaran. Akibat beban fee 10% 317 paket program di 2016 sebesar Rp Rp 28.563.440.000, kerugian negara mencapai Rp Rp 2.856.344.000. Sementara dugaan kerugian di tahun 2017 dari 314 paket program dengan total anggaran Rp 29.313.998.900 mencapai Rp 2.931.399.890.

"Kami berharap laporan yang telah disampaikan GNPK ini bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," pintanya.

Kasie Intel Kejari Batang Arfan Halim mengatakan, Kejaksaan Negeri Batang akan menindaklanjuti laporan GNPK dengan mempelajari terlebih dahulu.

"Ini baru laporan. Kita pelajari dan telaah dulu. Prosesnya seperti itu," katanya.